



LKJIP 2025



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- DP3A Provinsi Kaltim
- @dp3a.kaltim
- dp3akaltim@gmail.com
- www.dp3a.kaltimprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Hasil pencapaian kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Samarinda, 26 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kaltim,



DR. Aini Nur Aini, S.Kom
Pembina

Nip. 197410302006042017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL.....	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	10
B. Tugas dan Fungsi.....	10
C. Struktur Organisasi.....	12
D. Sumber Daya Manusia.....	13
E. Aspek Strategi Organisasi.....	14
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	17
G. Sarana dan Prasarana Kerja.....	20

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.....	21
B. Indikator Kinerja Utama.....	31
C. Perjanjian Kinerja.....	33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya	36
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	42
C. Analisis Capaian Kinerja	43
D. Capaian Kinerja Lainnya	78
E. Realisasi Anggaran.....	78
F. Evaluasi Budaya Kerja	

BAB IV PENUTUP



DAFTAR TABEL

TABEL

1.1	Jumlah Pegawai DKP3A Menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan	13
1.2	Sarana dan Prasarana Di lingkungan DKP3A	18
2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 3 Tahun	20
2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran	22
2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP3A tahun 2024 - 2026.....	26
2.4	Indikator Perjanjian Kinerja (PK) DKP3A Tahun 2024	29
2.5	Target Belanja DKP3A Tahun 2024.....	30
2.6	Anggaran Per Sasaran Strategis	31
3.1	Anggaran Per Sasaran 2023	32
3.2	Tindak Lanjut hasil evaluasi Inspektorat.....	32
3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	34
3.4	Sasaran 1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	35
3.5	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	35
3.6	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	36
3.7	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	36
3.8	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	37
3.9	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran.....	38
3.10	Sasaran 2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	38
3.11	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	39
3.12	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	39
3.13	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	40
3.14	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	41
3.15	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran.....	41
3.16	Sasaran 3 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	42
3.17	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	44
3.18	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	44



3.19	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	45
3.20	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	46
3.21	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran.....	46
3.22	Sasaran 4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	47
3.23	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	48
3.24	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	48
3.25	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	49
3.26	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	50
3.27	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran.....	50
3.28	Sasaran 5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	51
3.29	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	51
3.30	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	52
3.31	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	52
3.32	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	53
3.33	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran.....	53
3.34	Sasaran 6 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	54
3.35	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	54
3.36	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	55
3.37	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	55
3.38	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	56
3.39	Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran.....	56
3.40	Pencapaian SDG's Tahun 2024.....	57
3.41	Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	58
3.42	Realisasi anggaran per program kegiatan.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pembentukan DKP3A Provinsi mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Maka ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sistem data gender dan anak;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.

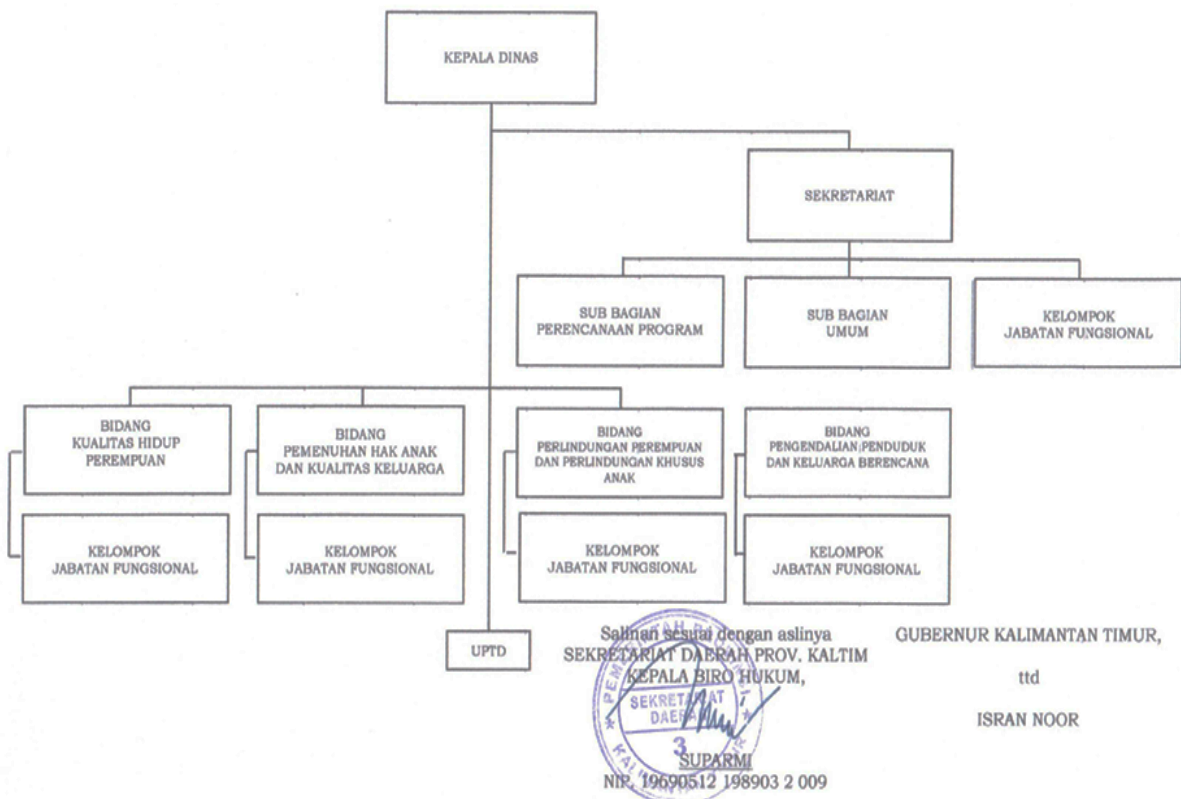
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, UPTD PPA, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- b. Pelaksanan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi dan perlindungan perempuan dan anak;

- c. Pemantuan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi merupakan komponen-komponen penyusun pemerintahan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal dan seorang atasan pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seorang atasan pun juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Struktur organisasi DP3A Provinsi Kaltim disusun berdasarkan Pergub Kaltim No. 43 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja DPPP Provinsi Kaltim sesuai gambar dibawah ini :



Gambar : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, dapat digambarkan bahwa Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur membawahi :

a. Sekretariat

Terdiri dari Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan Program

b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdiri dari Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang Kesetaraan Gender

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Sistem Informasi Data Gender dan Anak

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terdiri dari subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

g. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

D. SUMBER DAYA APARATUR

Pegawai di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 69 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 39 orang dan Non ASN 30 orang. Pegawai ASN terdiri dari 19 orang Laki-Laki dan 20 orang Perempuan. Tingkat pendidikan pegawai merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi, dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan golongan pegawai mempermudah penempatan berdasarkan kebutuhan, kesesuaian tugas dan peran pegawai guna pencapaian kinerja secara efektif, efisien dengan memperhatikan pengembangan kompetensi setiap pegawai.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai DKP3A Menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan



Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	S-2	S-1	D-III	SLT A	SLTP	SD
Kepala Dinas	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	4	2	5	-	-	-	5	1	-	-	-	-
Kasi/ Kasubbag	4	1	2	3	-	-	2	3	-	-	-	-
Fungsional Umum	10	15	3	21	1	-	5	7	2	2	-	-
Fungsional Tertentu	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
Jlh PNS	19	20	11	26	2	-	13	21	3	2	-	-
Jlh Honor/PTT	16	14	-	-	-	-	1	20	2	7	-	-
Jlh PNS + Honor/PTT	35	34	11	26	2	-	14	41	5	9	-	-

Keterangan : Data per 31 Desember 2025

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Kalimantan timur dilakukan melalui identifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari tujuan organisasi, melalui analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan melalui Sasaran Strategis sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukong ASN Berakhlak

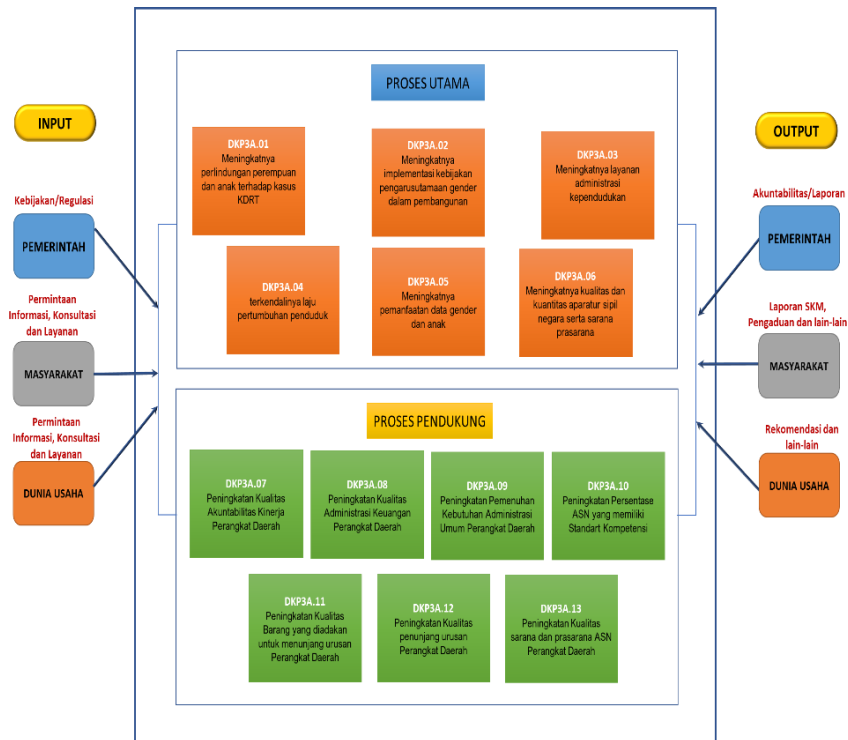
Sasaran 2 : Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi

Sasaran 3 : Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

Sasaran 4 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana

Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak

Sasaran 6 : Meningkatnya Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan anak Provinsi Kalimantan



Gambar : Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Analisis sasaran strategis Renstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur menjadi Proses Bisnis yang diuraikan menjadi proses utama, proses bisnis manajemen dan proses bisnis pendukung. Peta Poses Utama ini diambil dari Sasaran yang ingin dicapai melalui Renstra dalam setiap tahunnya sampai lima tahun mendatang.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Permasalahan utama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam beberapa poin di bawah ini :

1. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.
 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.



- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.
 - Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.
 - Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.
2. Permasalahan terkait Perlindungan Hak Perempuan:
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - ✓ Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak optimal karena terdapat kasus yang tidak dilaporkan, masyarakat masih enggan melaporkan karena menanggung aib keluarga, atau karena tidak mengetahui lembaga layanan.
 - ✓ Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
 - ✓ Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban kekerasan
 - Masih rentannya perempuan dan anak dari tindak pornografi dan kekerasan
 - Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.
 - Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam pemenuhan perlindungan hak perempuan.
3. Permasalahan terkait Perlindungan Anak:
- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografidan *cyber crime*.



- Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
 - Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
 - Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi.
 - Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan baik.
4. Permasalahan terkait Tumbuh Kembang Anak:
- Kurangnya pengetahuan/informasi tentang pengasuhan dan pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan.
 - Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 - Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
 - Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.
5. Permasalahan terkait Sistem Informasi Gender dan Anak.
- Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan terupdate
 - Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak
 - Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
 - Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
6. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan KB
- Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal
 - Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.

- Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga
 - Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB
 - Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan pertama belum optimal.
7. Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Kurang optimalnya fungsi organisasi/lembaga penyedia data dalam penyediaan data terpilah atau data gender.
 - Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait

G. SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana dan kondisinya yang dimiliki DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Di lingkungan DKP3A
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	4.213,67	m2
2	Gedung	3	Unit
	Gedung 1	1.440	m2
	Gedung 2	350	m2
	Gedung 3	48	m2
	Mushola	36	m2
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	2	Jaringan
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	1	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Aula	1	Ruang
10	Koperasi	-	-
11	Taman Dalam	-	-



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 tertuang dalam Renstra DKP3A Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang telah disusun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun bertujuan untuk mewujudkan kinerja Output maupun Outcome, serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2025 dan melaporkannya dalam dokumen LKjIP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 6 (enam) Tujuan dan 6 (enam) Sasaran, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target tercantum pada tabel di bawah ini:



Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 3 Tahun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja/Sasaran pada tahun ke-				Ket
						2022	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	96	97	98	99		
		Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Poin	70.46	70.50	S	71.50		
2	Meningkatkan Daya Saing Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,89	67,31	67,64	67,98		
		Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	Lembaga PEKKA	0	2	2	2		
			Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	0	400	300	300		
3	Meningkatkan Upaya perlindungan hak Perempuan dan anak Prov. Kaltim		Ratio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0.018	0.030	0.025	0.020		
		Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	24.96	23.46	23.23	23.11		
4	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas		Persentase Peningkatan ketersediaan data gender dan anak	%	65	75	80	85		
		Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	%	65	75	80	80		
5	Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana		Angka Kelahiran Total (Total Fertility/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	%	2.18	2.10	2.10	2.10		
		Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas KB	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.33	2.53	2.63	2.73		
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		Persentase Kepemilikan KTP-el se Kaltim	%	99.3	99.4	99.5	99.6		
			Persentase Kepemilikan KIA se Kaltim	%	50	60	70	80		
			Persentase Kepemilikan Akta Kel Anak se Kaltim	%	98	98,5	99	99.5		
		Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100	100		

Tabel 2.2

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Meningkatkan Upaya perlindungan hak perempuan dan anak Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
							Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
								Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi		
							Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
						Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi
2	Meningkatkan Daya Saing Perempuan	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan & program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
							Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Advokai Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
							Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
							Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
3	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan	%	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	berkualitas		Anak pada Perangkat Daerah			Daerah Provinsi	
							Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
							Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
						Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
							Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
							Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
							Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
							Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
5	Meningkatkan upaya pengendalian pembangunan Keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
							Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana
							Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
							Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi dan Sosialisasi GDPK
							Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
6	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
							Fasilitasi Kunjungan Tamu
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP3A tahun 2024 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	%	Data base kependudukan menggambarkan layanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan untuk masyarakat meliputi kepemilikan Kartu Keluarga, Akte, E-KTP, Kartu Identitas Anak, Dll. Ketersediaan administrasi kependudukan sangat diperlukan oleh masyarakat guna mendapatkan kemudahan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dll yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga	ministrasi kependudukan Kab/Kota, Direktorat jenderal kependudukan & catatan sipil Kemendagri	Penyajian Data Kependudukan : $\frac{\text{Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun}}{2 \text{ Kali}} \times 100$
						Rasio Kepemilikan E-KTP : $\frac{\text{Jumlah perekaman E-KTP}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100$
						Rasio Kepemilikan KIA : $\frac{\text{Jumlah anak yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak 0-17 tahun}} \times 100$
						Rasio Kepemilikan IKD : $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki IKD}}{\text{Jumlah wajib KTP}} \times 100$
2	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan hak anak di Prov. Kaltim	Ratio kekerasan terhadap perempuan, termaksud TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	%	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (sesuai pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)	Simfoni PPPA	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan : $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100$
		Ratio kekerasan terhadap anak (Per 10.000 penduduk anak)				Rasio Kekerasan Terhadap Anak : $\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi Provinsi dan didampingi}}{\text{Jumlah penduduk anak}} \times 100$



3	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada perangkat daerah	%	Data gender atau data pilah merupakan informasi utama yang diperlukan untuk mempertimbangkan waktu, objek, sasaran secara tepat, sehingga program dan kegiatan dapat dicapai optimal. Dengan data gender hasil partisipasi, manfaat dan fungsi kontrol pembangunan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Data gender	Simfoni PPPA	<p>Persentase Data Terpilah Gender dan Anak</p> <p>: $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memberikan data terpilah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$</p>
				dalam pembangunan merupakan mandat RPJMN, RPJMD yang dipedomani dalam pelaksanaan program kegiatan DKP3A dan seluruh perangkat daerah		Jumlah perangkat daerah
4	Meningkatkan kualitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga (PEKA yang terstandarisasi)	Jumlah lembaga	Melakukan standarisasi terhadap kelompok/perkumpulan masyarakat perempuan kepala rumah tangga agar terstandarisasi sesuai ketentuan penilaian dari Kementerian PPPA	E-Infoduk	Jumlah lembaga PEKA Kabupaten/Kota
		Jumlah PEKA yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Jumlah Orang	Jumlah anggota kelompok/perkumpulan perempuan kepala rumah tangga yang akan dibina dan diarahkan dalam pengembangan usaha dalam memperoleh legalitas berusaha (NIB)	E-Infoduk	Jumlah anggota PEKA yang memiliki NIB
5	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	Adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah desa di Kaltim	BKKBN	$r = \left\{ \frac{P_t}{P_0} \times \frac{(1-t)^{-1}}{t} \right\} \times 100$ $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_o)$ <p>r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t</p>

B. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukong ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Poin	70,50
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	Lembaga PEKKA	2
		Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	400
3	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	23,46
4	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah	%	75
5	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2.53
6	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100

1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 38.267.474.996,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi Rp. 40.077.474.996,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 38.628.694.763,- dan Belanja Modal Rp. 1.448.780.233,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 36.894.635.174,- (92,06 %) dengan rincian untuk belanja operasi sebesar Rp. 35,594,157,026,- (92,95%) belanja modal sebesar Rp. 1.300.478.148,- (89,76%).

2. Target Belanja DKP3A Provinsi Kaltim

Tabel 2.5
Target Belanja DKP3A Tahun 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Operasi	Rp. 38.628.694.763,-	Rp. 36.894.635.174,-	92,95%
2	Belanja modal	Rp. 1.448.780.233,-	Rp. 1.300.478.148,-	89,76%
	JUMLAH	Rp. 40.077.474.996,-	Rp. 36.894.635.174,-	92,06%



3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2024 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.0
Anggaran Per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	23.657.029.172,00	22.120.618.109,00	93,51
Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	4.250.481.300,00	3.788.160.637,00	89,12
Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	3.905.872.664,00	3.300.890.656,00	84,51
Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	957.365.000,00	845.963.848,00	88,36
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	2.810.624.000,00	2.691.295.872,00	95,75
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	2.733.258.000,00	2.536.710.713,00	92,81
Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim (UPTD)	1.762.844.860,00	1.610.995.339,00	91,39
JUMLAH	40.077.474.996,00	36.894.635.174,00	92,06



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja DKP3A Provinsi Kaltim adalah perwujudan kewajiban DKP3A Provinsi Kaltim untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang telah diperjanjikan secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja DKP3A Provinsi Kaltim Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pencapaian setiap indikator pada masing masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

Pada Sub Bab ini disajikan :

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,50	23,70
2	Pengukuran Kinerja	20%	15,00	21,30
3	Pelaporan Kinerja	10%	6,40	10,65
4	Evaluasi Kinerja	20%	13,40	16,26
5	Capaian Kinerja	20%	15,20	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	75,50	71,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

Nilai SAKIP DKP3A Provinsi Kaltim tahun 2024 adalah 75,50 (B) dan nilai SAKIP tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 71,90 namun masih dengan Predikat BB (Sangat Baik). Hal ini dikarenakan penyesuaian template baru penetapan dari Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2022.



2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tabel 3.2

Tindak Lanjut hasil evaluasi Inspektorat

NO	KOMPONEN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	OUTPUT	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
1	Perencanaan Kinerja	1 Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang baik.	Menyusun dan menetapkan SOP /pedoman teknis perencanaan kinerja Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	SOP LKJIP	
2	Pengukuran kinerja	1 Pimpinan harus terlibat aktif sebagai pengambil keputusan (Decision maker) dalam mengukur capaian Organisasi;	Melaksanakan rapat evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran secara berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan) Membuat Matriks Rencana Program Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Memanfaatkan dokumen PK IKU/RKT sebagai dasar perencanaan penganggaran dan memonitor pencapaiannya secara	Nota dinas, notulensi, dokumentasi, absensi Matrik sistem kerja, Rencana Aksi Kegiatan Laporan Kinerja Bulanan, triwulan, semester	



			Menggunakan Dokumen Pengukuran Kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian anggaran dalam moncapal kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja Organisasi.	berkala Melaksanakan monev keterisian per triwulan terhadap capaian kinerja pada aplikasi E-SAKIP secara internal	Nota dinas pengisian e-sakip	
3	Pelaporan kinerja	2	1) Informasi dalam laporan kinerja berkala dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.;	Melaksanakan rapat internal secara berkala membahas pencapaian target kinerja Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2025 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP	Nota dinas, notulensi, dokumentasi, absensi LKJIP 2025	
			Informasi dalam Laporan kinerja dapat digunakan dalam melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja organisasi.	Membuat laporan kinerja secara berkala yaitu laporan bulanan, laporan kinerja persemester dan pertriwulan	Laporan Kinerja bulanan, laporan kinerja persemester dan pertriwulan	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :	1	Meningkatkan Implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;	Rapat internal bersama pimpinan dan pejabat struktural membahas tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Berita Acara tindak lanjut	



			Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	
--	--	--	--	--

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi di lingkungan DKP3A tahun 2025 tertera dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	%	23,23	TW 1		15,17
					TW 2		31,09
					TW 3		46,36
					TW 4	23,23	57,44
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	Lemba PEKKA	2	TW 1		
					TW 2		
					TW 3		
					TW 4	2	1
		Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	300	TW 1		
					TW 2		
					TW 3		127
					TW 4	300	82
3	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	TW 1		
					TW 2		50
					TW 3		
					TW 4	100	100
4	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,63	TW 1		
					TW 2		
					TW 3		
					TW 4	2,63	2,67
5	Meningkatnya	Persentase	%	80	TW 1		



	ketersediaan data gender dan anak	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah			TW 2		
					TW 3		
					TW 4	80	100
6	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	76,50	TW 1		
					TW 2		
					TW 3		
					TW 4	71,90	71,90

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.4

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk	%	23,23	57,44	247

Tahun 2025 pada indikator kinerja Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk memiliki target 23,23 % dengan realisasi capaian sebesar 57,44 % dengan formulasi :

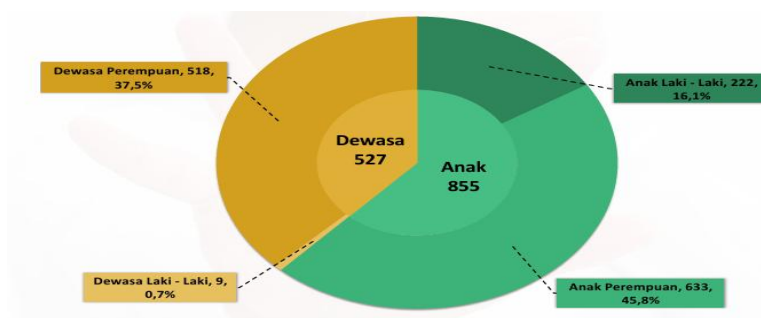
$$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$$

$$\frac{1.151}{2.003.810} \times 100.000 = 57,44$$

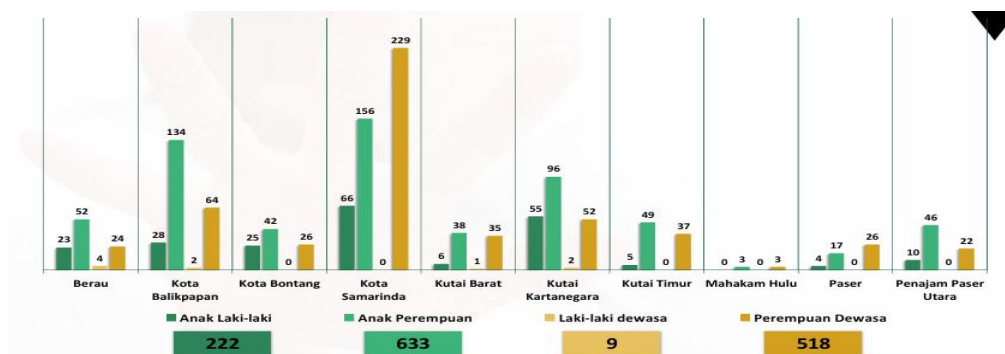
Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten kota dan lintas Provinsi pada aplikasi SIMFONI (Sistem Informasi On line Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai

bentuk layanan perlindungan berbasis data yang akurat dan saling terhubung antarwilayah yang terpadu dan komprehensif. Tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga semakin meningkat yang korbannya banyak dialami oleh perempuan dan anak. Untuk melakukan pencegahan, pelayanan penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta penguatan kelembagaan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi masyarakat. Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan terjadi kasus kekerasan pada perempuan perempuan dewasa maupun anak-anak, hal itu terjadi karena adanya sarana teknologi diseluruh kab/kota yang memungkinkan melakukan percepatan dalam pelaporan, secara lengkap dapat dilihat dalam grafik berikut :

Jumlah kasus kekerasan Tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin



Jumlah kasus kekerasan Tahun 2025 berdasarkan jenis Kabupaten/Kota



Sumber data : Simfoni (DKP3A Provinsi Kaltim)

Tabel 3.5

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2024
			2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk	%	47,67	57,44
----	---	---	-------	-------	------

Pada tabel di atas indikator Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk realisasi kinerja tahun 2025 lebih besar dari pada tahun 2024. Capaian realisasi ini meningkat negatif sejumlah 1.151 korban kekerasan perempuan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya sejumlah 946 korban kekerasan. Hal ini mendorong adanya sosialisasi atau pendekatan kepada masyarakat luas adanya program “Dare to speak up” mengenai pentingnya keberanian melaporkan apabila melihat atau mengalami kekerasan kepada layanan SAPA 129 dengan 11 jenis layanan yang menjadi amanat UU TPKAS no. 12 tahun 2022 berkontribusi dalam penyelesaian penanganan kasus sampai tahap terminasi menjadi salah satu faktor tercapainya target yang diharapkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan ibarat fenomena gunung es artinya menggambarkan bahwa jumlah kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi jauh lebih besar daripada yang dilaporkan atau terlihat dipermukaan.

Indikator tujuan Renstra DKP3A Provinsi Kaltim Tahun 2025

Tertuang pada Renstra DKP3A Provinsi Kaltim indikator tujuan yaitu Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan target 0,025 % dan realisasi 0,028 %

$$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100 = 0,028 \%$$

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Pada RPD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029

Pada rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak dengan target 1,99 % dan mencapai realisasi sebesar 0,55 %. Tertuang dalam target Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPD Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026 untuk urusan PPA dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) provinsi}} \times 100 = 0,55 \%$$



$$\frac{59}{1.263.649} \times 10.000 = 0,55$$

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Pada LPPD Tahun 2025 :

1. **Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**

$$\frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$$

$$\frac{57}{57} \times 100 = 100$$

2. **Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**

$$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan aan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang}} \times 100\%$$

$$\frac{55}{55} \times 100 = 100$$

- a. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang strategis organisasi

Tabel 3.6

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2024)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	%	23,11	57,44



Pada tabel di atas target realisasi akhir Renstra DP3A Provinsi Kaltim adalah 23,11. Sedangkan realisasi di tahun 2025 sudah mencapai 57,44. Hal ini menggambarkan korban kekerasan setiap tahunnya semakin meningkat sehingga ratio semakin naik bersifat negatif. Dengan adanya program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan angka kekerasan di tahun mendatang semakin menurun

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.7

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk	%	47,67	Tidak ada realisasi nasional	-

Tidak ada perbandingan realisasi nasional khususnya pada Kementerian PPPA-RI

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

1. Proses pelaporan kasus kekerasan melalui aplikasi SIMFONI PPPA Prov. Kaltim secara online yang dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota ke Provinsi secara rutin
2. Rapat koordinasi urusan PPPA se Kaltim
3. Peningkatan kapasitas SDM tenaga layanan SAPA 129
4. Pendekatan norma sosial dan sensitivitas gender dalam menganalisa perdagangan orang
5. Peran pendampingan dan prinsip-prinsip pendampingan bagi korban TPPO
6. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan terkait perempuan

Faktor Kegagalan :

1. Belum semua perempuan memiliki keberanian dalam mengungkap dan melaporkan kasus yang di alami
2. Pemahaman masyarakat yang masih menganggap bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi sehingga tidak etis bila turut terlibat didalamnya
3. Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undnagan, sehingga terjado ketidakharmonisan substansi antar undang-undang dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan
4. Masih minimnya lembaga layanan perlindungan hak perempuan yang terstandarisasi



Alternatif Solusi :

- 1.Melaksanakan FGD Program kegiatan perlindungan perempuan
- 2.Menginisiasi Gerakan/Kampanye Berani berbicara
- 3.Penyusunan Perda Perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak terbaru
- 4.Kampanye Literasi Keamanan Digital
- 5.Penyusunan Tim Pencegahan dan Pelayanan KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)
- 6.Menyampaikan promosi dan iklan tentang perlindungan tentang kekerasan melalui media sosial

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim	47,67	95,38

Be
$$\text{Rasio efisiensi sasaran 1} = \frac{4.799.011.646}{5.031.587.771} \times 100 = 95,38$$
 naan pada Sasaran 1 Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT di Prov. Kaltim adalah sebesar 95,38 % masuk dalam kategori efektif. Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 1 Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik pada belanja honorarium dan perjalanan dinas.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9

Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi
---------------	--------	--------------------	-----------



	PROGRAM BIDANG P2KA	5.013.546.422	4.618.151.494
37.660	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.291.670.694	2.190.368.703
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	863.906.478	788.755.081
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	489.866.030	419.649.826
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	374.040.448	369.105.255
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	1.111.685.470	1.093.675.364
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	863.840.000	858.783.945
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	247.845.470	234.891.419
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	316.078.746	307.938.258
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	316.078.746	307.938.258
38.391	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	791.605.694	627.304.597
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	791.605.694	627.304.597
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	381.625.714	250.440.332
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	409.979.980	376.864.265
39.121	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.930.270.034	1.800.478.194
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.109.040.964	989.408.816



2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	452.598.628	440.355.976
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	656.442.336	549.052.840
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	402.335.074	397.472.890
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	168.276.590	164.213.940
2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	234.058.484	233.258.950
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	418.893.996	413.596.488
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	418.893.996	413.596.488
38.756	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	809.647.043	808.164.749
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	270.842.247	270.273.748
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	115.068.431	114.996.900
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	155.773.816	155.276.848
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	538.804.796	537.891.001
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	275.031.530	274.708.884
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	263.773.266	263.182.117

Pada sasaran 1 yang di ampu 4 Program yaitu pertama **Program Perlindungan Perempuan** melalui kegiatan diantaranya Rapat kerja Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Rapat Koordinasi TPPO. Kegiatan selanjutnya di jalankan oleh UPTD PPA yaitu pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak serta melaksnakan peningkatan kapasitas



SDM melalui kegiatan peningkatan kapasitas pelatihan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan.

Program Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan KIE gerakan bersama menciptakan institusi pendidikan bebas kekerasan, kegiatan pencegahan perkawinan usia anak dan kegiatan lindungi masa depan anak bersama OJOL BERLIAN

Program Sistem Data Gender dan Anak memiliki tugas dan fungsi ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil program/kegiatan. melalui aplikasi SIMFONI PPA merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. SIMFONI PPA bekerja sama dengan instansi pemerintahan di setiap provinsi / kabupaten / kota sehingga aplikasi dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dibawah pada tingkat nasional meliputi provinsi / kabupaten / kota secara up to date dan rutin. DP3A Provinsi Kaltim melalui program ini memberikan output Profil kekerasan serta buku data kekerasan bulanan

Program Pemenuhan Hak Anak melalui Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga melalui pusat pembelajaran keluarga di kabupaten Paser diikuti sejumlah 80 peserta, kegiatan rapat kerja forum anak dilaksanakan di Samarinda dan diikuti 58 peserta. Kegiatan sosialisasi dampak akses digital terhadap perkembangan anak di Samarinda diikuti sejumlah 75 peserta, kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di Samarinda diikuti sejumlah 50 peserta, Seminar dan parenting disiplin positif di era digital diikuti sejumlah 150 peserta, Kegiatan Sosialisasi desa ramah perempuan dan peduli anak di Kutai Barat diikuti sejumlah 77 peserta, Kegiatan rapat koordinasi teknis KLAdi Balikpapan diikuti sejumlah 100 peserta,

Kinerja UPTD PPA DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2025

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu

Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak jumlahnya fluktuatif setiap tahunnya sehingga tidak dapat di prediksi baik jumlah maupun jenis kasusnya. Tahun 2025



UPTD PPA DP3A Provinsi Kaltim, POLDA Kaltim, RSUD Abdul wahab Sjahranie, Polresta Samarinda Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), bersama lembaga - lembaga pemerhati Perempuan dan anak telah melakukan pendampingan serta penanganan kasus Pengaduan Kekerasan Perempuan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim.

Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendampingi korban, (3) Mendampingi korban bila harus melakukan visum ke puskesmas atau Rumah Sakit, (4) Mendampingi korban selama proses penyelesaian sampai pengadilan, (5) Memberikan bantuan hukum (Advokasi) kepada korban, (6) Memberikan bimbingan pasca trauma (Trauma Healing) dengan menyediakan psikolog. Target Capaian indikator sasaran Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Capaian indikator sasaran ini didukung dengan beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak



Laporan Kasus Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2025 melalui pengaduan langsung dan hotline UPTD PPA (layanan 113) sejumlah 69 korban, Data kasus perempuan korban kekerasan melalui rujukan lintas kabupaten/kota sejumlah 32 pengaduan serta data kasus perempuan korban kekerasan melalui hotline SAPA 129 Kementerian PPPA-RI sejumlah 36 korban. Korban kekerasan menerima berbagai layanan untuk 1 orang korban dapat menerima lebih dari 1 layanan, diantaranya layanan pengaduan, penjangkauan, pendampingan hukum, pendampingan psikologi, pra mediasi, pendampingan hukum, rujukan lanjutan, mediasi, rujukan kasus, konsultasi, konsultasi dan rumah perlindungan, dll

Data pengaduan langsung dan hotline UPTD PPA (layanan 113)

DATA KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MELALUI PENGADUAN LANGSUNG DAN HOTLINE UPTD PPA

No. Kasus	Isi/Isi Korban	Jenis Korban	Umur	Unit Pelaku Terpapar	Jenis Korban	Umur	Hubungan dengan	Kategori	Tanggal Masuk	Penyedia Layanan	Jenis Kasus Anak - Anak	Lokasi Kasus	Proses	Tanggal Terminate	Layanan
PA-01/2025	RS	Perempuan	22 Tahun	AK	Laki -Laki	28 Tahun	Orang Lain	Dewasa	8 Januari 2025	Penyedia Seluruh		Universitas DIPA, Mekarior	Terminate	8 Januari 2025	1. Pengaduan 2. Penjangkauan 3. Pendampingan Hukum
PA-03/2025	E	Perempuan	29 Tahun	-	-	-	-	Dewasa	14 Januari 2025	Kekerasan Psikis		Samarinda	Terminate	-	1. Pengaduan 2. Penjangkauan 3. Pendampingan Psikologi 4. Pemantauan 5. Mediasi
PA-11/2025	SW	Perempuan	38 Tahun	AH	Laki -Laki	37 Tahun	Suami	Dewasa	11 Februari 2025	Pencemaran Nama Baik		Samarinda	Terminate	-	1. Pengaduan 2. Pendampingan Hukum 3. Penjangkauan 4. Pendampingan Psikologi 5. Mediasi
PA-14/2025	SKS, PA, AS, JM	Perempuan, Perempuan, Perempuan, Laki-laki	-	B	Laki -Laki	48 Tahun	Suami	Dewasa	22 Februari 2025	KDRT Fisik		Samarinda	Terminate (pemantauan an ekonomi)	-	1. Pengaduan 2. Penjangkauan 3. Pendampingan Psikologi 4. Pemantauan 5. Mediasi
PA-17/2025	W	Perempuan	35 Tahun	-	-	-	-	Dewasa	-	KDRT		Melayang	Casa Casatel	-	1. Pengaduan 2. Penjangkauan
PA-18/2025	M	Perempuan	38 tahun	-	-	-	-	Dewasa	-	KDRT Fisik		Samarinda	Terminate	20 Mei 2025	1. Pengaduan, 2. Pendampingan kesehatan, 3. Pendampingan Psikologis



PM-50203	BW	Perempuan	38 Tahun	H	Laki-Laki	40 Tahun	Suami	Dewasa	2 Oktober 2025	KDRT (Penelantaran Rumah Tangga)	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Konsultasi, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-51005	PR	Perempuan	28 Tahun	NY	Laki-Laki	35 Tahun	Suami	Dewasa	3 Oktober 2025	Pengancaman	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Konsultasi, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-50205	BW	Perempuan	38 Tahun	H	Laki-Laki	40 Tahun	Suami	Dewasa	2 Oktober 2025	KDRT (Penelantaran Rumah Tangga)	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Konsultasi, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-51005	PR	Perempuan	28 Tahun	NY	Laki-Laki	35 Tahun	Suami	Dewasa	3 Oktober 2025	Pengancaman	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Konsultasi, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-52005	PK	Perempuan	39 Tahun	MSP	Laki-Laki	41 Tahun	Suami	Dewasa	3 Oktober 2025	Penelantaran keluarga	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Konsultasi, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-54005	D	Perempuan	35 Tahun								Tenggarong	proses	1. Pengakuan, 2. Konsultasi, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-55205	PD	Perempuan	25 Tahun	EE	Laki-Laki				7 Oktober 2025	KDRT (Kekerasan Seksual)	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Konsultasi, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-56205	BRS	Perempuan	25 Tahun	OK	Laki-Laki	27 Tahun	Suami	Dewasa	9 Oktober 2025	KDRT (Fisk dan Psikis)	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Konsultasi, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-57205	L	Perempuan	25							Kekerasan Seksual dan Pengancaman	Samarinda	Terminasi	1. Pengakuan, 2. Rujukan, dan 3. Mediasi
PM-58205	N	Perempuan	28							KDRT	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Rujukan, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-60005	MS	Perempuan	31	R	Laki-Laki	34 Tahun	Suami	Dewasa	16 Oktober 2025	KDRT (PSIK)	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Konsultasi, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-60005	PSC	Perempuan	33	ASS					23 Oktober 2025	KDRT	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Rujukan, dan 3. Mediasi
PM-61005	AA	Laki-Laki							23 Oktober 2025	Hak Asuh Anak	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Rujukan, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-62205	WSS	Perempuan	33 Tahun	ZADR	Laki-Laki	33 Tahun	Suami	Dewasa	03 Nov-25	KDRT (Psikis)	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Rujukan, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-61005	DMRQ	Perempuan	27 Tahun	JTN	Laki-Laki	27 Tahun	Suami	Dewasa	1 Desember 2025	KDRT (PSIK dan Penelantaran Rumah Tangga)	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Konsultasi, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-68205	M	Perempuan	33 Tahun						3 Desember 2025	lingka	Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Rujukan, dan 3. Pendampingan Hukum
PM-68205	A	Perempuan							lingka		Samarinda	proses	1. Pengakuan, 2. Rujukan, dan 3. Pendampingan Hukum
JUMLAH PENGADUAN 35										JUMLAH LAYANAN 113			

Data kasus perempuan korban kekerasan melalui hotline SAPA 129 Kementerian PPPA-RI

DATA KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MELALUI PENGADUAN HOTLINE SAPA 129 KEMENPPPA

No	Nama Korban	Nama Agent Daerah	Kota / Daerah	Jalur Laporan	Tanggal Kasus Masuk	Jenis Kasus	Layanan
2.	IWP	AR	Kota Samarinda	Via Chat SAPA129	16/01/2025	KBGO	1. Pengaduan 2. Rujukan
6	DK	AR	Kota Balikpapan	Via Chat SAPA129	18/02/2025	KDRT	1. Pengaduan 2. Rujukan
7	H	AR	Kota Samarinda	Via Chat SAPA129	04/04/2025	KDRT	1. Pengaduan 2. Rujukan
15	DEK	AR	Kota Samarinda	Via Chat SAPA129	05/02/2025	KDRT	1. Pengaduan 2. Rujukan
16	APK	AR	Kota Samarinda	Via Chat SAPA129	17/5/2025	Bullying	1. Pengaduan 2. Rujukan
17	AKI	AR	Kota Samarinda	Via Chat SAPA129	22/5/2025	KDRT	1. Pengaduan 2. Rujukan
18	HH	AR	Kab Penajam Paser Utara	Via Chat SAPA129	31/5/2025	Hak Asuh Anak	1. Pengaduan 2. Rujukan
19	AA	AR	Kota Balikpapan	Via Chat SAPA130	06/06/2025	KBGO	1. Pengaduan 2. Rujukan
20	NS	FRD	Kota Samarinda	Via Chat SAPA129	26/6/2025	KBGO	1. Pengaduan 2. Rujukan
22	AZ	FRD	Kab Kutai Kartanegara	Via Chat SAPA129	07/12/2025	KDRT	1. Pengaduan 2. Rujukan
23	ARR	FRD	Kab Penajam Paser Utara	Via Chat SAPA129	07/12/2025	KDRT	1. Pengaduan 2. Rujukan
24	AR	FRD	Kota Balikpapan	Via Chat SAPA129	18/07/2025	KDRT	1. Pengaduan 2. Rujukan
25	RZAF	FRD	Kota Balikpapan	Via Chat SAPA129	18/07/2025	Kekerasan Psikis	1. Pengaduan 2. Rujukan
27	NJ	FRD	Kota Samarinda	Via Chat SAPA129	08/05/2025	Penelantaran Anak	1. Pengaduan 2. Rujukan
28	N	FRD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Via Chat SAPA129	16/8/25	Kekerasan Psikis	1. Pengaduan 2. Rujukan
29	DS	FRD	Kota Samarinda	Via Chat SAPA129	18/8/25	Penelantaran Anak	1. Pengaduan 2. Rujukan
30	NMIS & CNB	FRD	Kota Balikpapan	Via Chat SAPA129	21/8/25	Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur	1. Pengaduan 2. Rujukan
31	ST	FRD	Kota Balikpapan	Via Chat SAPA129	25/8/25	KDRT	1. Pengaduan 2. Rujukan
32	RA	FRD	Kota Samarinda	Via Chat SAPA129	31/8/25	Kekerasan Fisik	1. Pengaduan 2. Rujukan
33	QA	FRD	Kota Samarinda	Via Chat SAPA129	11/9/25	Pendampingan Psikologis	1. Pengaduan 2. Rujukan
34	SNH	FRD	Kota Samarinda	Via Chat SAPA129	12/12/2025	Pendampingan Psikologis	1. Pengaduan 2. Rujukan
35	N	FRD	Kota Balikpapan	Via Chat SAPA129	17/12/2025	Pendampingan Psikologis	1. Pengaduan 2. Rujukan
JUMLAH PENGADUAN 22					JUMLAH LAYANAN 44		

Data Rujukan Lintas Kabupaten/Kota

DATA KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MELALUI RUJUKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA

No. Kasus	Rujukan Dari	Isuasi Korban	Jenis Kekerasan	Usia	Instansi Pengaduan	Pelayanan yang Korban	Rujukan	Tanggal Masuk	Angka Kasus Awal	Angka Kasus Akhir	Lokasi Rujukan	Proses	Logisitas
R-03	UPTD PPA KUTAI TIMUR	ER	Perempuan	44				4 Februari 2025	Dewasa		Kalibng	Terminasi	1. Pengaduan 2. Rujukan 3. Konsultasi 4. Pengaduan
R-04	DPJAPZKB Kalimantan Tengah	AS	Perempuan	30	YM	Pacar	Kekerasan Seksual, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis	7 Februari 2025	Dewasa		Kalibng	Terminasi	1. Pengaduan 2. Rujukan dan 3. Konsultasi
R-06	DPJAPZKB Sulawesi Selatan	YS	Perempuan	32	CT	Suami	Penelantaran	28 Februari 2025	Dewasa		Sulawesi Selatan	Terminasi	1. Pengaduan 2. Rujukan 3. Pengaduan
R-07	DPJAPZKB Berau	NY	Perempuan	33	-		Penelantaran	5 Maret 2025	Dewasa		Berau	Terminasi	1. Pengaduan 2. Mediasi 3. Pengaduan
R-11	UPTD PPA Kota Bontang	DS	Perempuan	32	A	Suami	KDRT Psikis	28 Maret 2025	Dewasa		Bontang	Terminasi	1. Pengaduan 2. Rujukan dan 3. Mediasi



Sasaran 2 : MENINGKATNYA UPAYA PENGUATAN SERTA PENGEMBANGAN KAPASITAS PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN YANG BERDAYA SAING BIDANG POLITIK DAN EKONOMI

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.10

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	Lembaga	2	1	50
2	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	orang	300	209	69,67

Guna meningkatkan IPG serta komitmen Urusan PPPA Provinsi dan Kabupaten Kota dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media dalam mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi serta mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah. Maka di laksanakan pendampingan kepada lembaga layanan pemberdayaan perempuan pada PW Aisyah Kalimantan Timur dengan mengisi borang penilaian persyaratan guna menuju standarisasi LPLPP oleh Kementerian PPA-RI, hal ini menjadi kendala dikarenakan masih belum adanya pedoman atau Petunjuk Teknis terkait standarisasi LPLPP yang menjadi acuan daerah dalam melaksanakan standarisasi di daerah Hal tersebut menggambarkan belum tercapainya target pada indikator Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan) di karenakan kendala di atas



Pada indikator kedua dengan tujuan guna meningkatkan kapasitas pemberdayaan perempuan sebagai upaya mengangkat kesenjangan ekonomi perempuan dan mengangkat capaian sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Timur melalui kelompok pelaku ekonomi perempuan yang tergabung dalam Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Pada indikator Jumlah lembaga PEKA yang terstandarisasi dengan target 2 lembaga telah mencapai 1 target dan dibentuk ada lembaga PEKKA berdasarkan SK Gubernur nomor 100.3.3.1/k.429/2024 tentang penetapan kelompok perempuan kepala keluarga kabupaten/kota Provinsi Kaltim. Tahun 2025 terdiri dari 3 kab/kota. Dan target indikator Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan (PEKKA) dengan target 300 orang telah mencapai 209 orang terdiri dari capaian kegiatan di Bontang 82 orang, Kutai Timur 100 orang dan PPU sejumlah 82 orang. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan (PEKKA) tahun 2025 tidak mencapai target hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Kegiatan di atas merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas sumber daya bagi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan melalui industri rumahan sebagai basis pelaku ekonomi perempuan diharapkan dapat bertransformasi menjadi UMKM yang dapat meningkatkan ekonomi perempuan di daerah tersebut guna mengungkit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Kalimantan Timur

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.11

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2025
			2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	Lembaga	0	1
2	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	400	209



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.12

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2025)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)	%	2	1
2	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	300	209

Indikator Tujuan Renstra DKP3A Provinsi Kaltim

Tertuang pada Renstra DKP3A Provinsi Kaltim indikator tujuan yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target 67,64%

Indikator Pemberdayaan Gender

Tahun 2025				Realisasi			
Target	Realisasi	% Capaian	Link data dukung Capaian	2023	2024	2025	Capaian Nasional Tahun 2025 (jika ada)
		0,00%		68,96	61,41	Tidak Rilis	77,62 (2024)

bl, Sumberdata : BPS (cth. BPS, dll)

Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Ada 3 (tiga) komposit yang menjadi ukuran dalam capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu 1. Sumbangan pendapatan perempuan 2. Keterlibatan perempuan di Parlemen; 3. Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi. Dari 3 (tiga) komposit tersebut telah dilakukan kegiatan pemberdayaan perempuan untuk mendorong sumbangan pendapatan perempuan dengan melakukan kegiatan pendampingan, sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan untuk peningkatan kapasitas sebagai pelaku usaha UMKM perempuan berupa legalitas usaha yaitu NIB dan sertifikasi halal ke daerah Kab/Kota.



Kerjasama dengan Lembaga akademisi Universitas UINSI Samarinda untuk pengembangan pemberdayaan perempuan di bidang usaha (ekonomi) sebagai upaya mendukung capaian sumbangan pendapatan perempuan. Adanya peningkatan Perempuan sebagai pelaku usaha (UMKM) setiap tahunnya merupakan salah faktor pendorong untuk capaian IDG.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada RPD Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPD Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026 untuk urusan PPA pada indikator Persentaser ARG pada belanja langsung APBD tahun 2025 dengan target 15 % dan mencapai realisasi sebesar 59,76 % dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD}} \times 100 = \dots$$

$$\frac{6.821.833.760.676}{11.415.715.077.350} \times 100 = 59,76$$

- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.13

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan	Lembaga	1	Tidak ada realisasi nasional	
2	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)	Orang	209	Tidak ada realisasi nasional	

Sampai dengan tahun ini belum ada kebijakan terkait standarisasi LPLPP yang di keluarkan Kementerian PPPA-RI sehingga belum ada pedoman menjadi acuan daerah dalam melaksanakan standarisasi.

- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :



- Telah terbentuknya regulasi terkait PUG (Perda Kaltim no. 2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender)
- Adanya komitmen kepala daerah dengan menjadikan GAP dan GBS sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan asistensi dokumen perencanaan anggaran
- Adanya evaluasi dan pemantauan implementasi PUG dari KPPA dengan memberikan penghargaan berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan penghargaan arindama dari Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten/Kota se Kaltim
- Provinsi dan Kabupaten/Kota telah berupaya untuk memenuhi prasyarat PUG dengan membentuk kelembagaan : Pokja PUG, Tim Penggerak PUG, Tim Teknis dan Focal Point.

Faktor Kegagalan :

- Masih rendahnya pemenuhan standarisasi layanan pemberdayaan perempuan
- Belum optimalnya implementasi PUG pada setiap urusan pembangunan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- Belum terinternalisasinya proses data pilah dalam setiap sektor sehingga penentuan kebijakan tidak melakukan analisa kesenjangan
- Budaya patriaki yang melembaga dalam kehidupan masyarakat sehingga munculnya ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki dalam peran pembangunan
- Lemahnya pendampingan pemberdayaan pada Perempuan Pedesaan, Penyintas Kekerasan, Perempuan UMKM, Kepemimpinan Perempuan, Perempuan Sektor Lingkungan
- Kurangnya identifikasi atau tagging Anggaran yang Responsif Gender (ARG)
- Kurangnya identifikasi terhadap kesenjangan partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kalimantan Timur
- Masih rendahnya sumbangan pendapatan Perempuan di Provinsi Kalimantan Timur

Alternatif Solusi :

- Melakukan advokasi koordinasi terkait implementasi PUG
- Melakukan penguatan kelembagaan PUG
- Menyelaraskan keserasian kebijakan PUG di daerah

-
D
alam melaksanakan implementasi PUG, 7 prasyarat PUG dalam alur kerja pengarusutamaan gender sekaligus menjadi kerangka input yang harus dibangun dalam implementasi PUG sehingga muncul output yang berkontribusi dalam meningkatkan KKG

-
P
endampingan organisasi perempuan terkait pemenuhan menuju standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)



- d
vokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Pedesaan, Penyintas Kekerasan, Perempuan UMKM, Kepemimpinan Perempuan, Perempuan Sektor Lingkungan

- M
elaksanakan penguatan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.14

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	1 lembaga 209 Orang	95,46

$$\text{Rasio Efisiensi Sasaran 2 : } \frac{1.479.424.175}{1.549.789.468} \times 100 = 95,46\%$$

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan pada Sasaran 2 adalah sebesar 95,46 % masuk dalam kategori efektif. Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 2 Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik pada belanja **honorarium dan perjalanan dinas**

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.15

Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.549.789.468	1.479.424.175
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	297.350.678	277.971.752
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	181.859.590	167.725.755
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	65.831.500	62.139.409
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	49.659.588	48.106.588
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	284.801.430	258.854.788
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	106.351.568	99.812.880
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	178.449.862	159.041.908
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	967.637.360	942.597.635
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	64.060.455	61.474.291
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	846.155.337	826.099.776
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	57.421.568	55.023.568

Pada sasaran 1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui kegiatan diantaranya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dengan kegiatan koordinasi workshop penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi dengan jumlah peserta 80 orang perwakilan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, kegiatan lainnya yaitu advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan melalui komunikasi publik yang efektif bagi



perempuan diikuti sebanyak 40 peserta.

Pada kegiatan pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsid dilaksanakan kegiatan diantaranya Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang sosial “kepemimpinan perempuan” diikuti 49 orang, advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi melalui standarisasi penyedia layanan pemberdayaan perempuan di ikuti sejumlah 40 orang, kegiatan sosialisasi peningkatan peran perempuan di bidang politik melalui PUG dalam kepemimpinan perempuan dilaksanakan di 3 kab/kota diikuti sejumlah 200 peserta.

Pada kegiatan penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi melaksanakan kegiatan Pendampingan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) pada PW Aisyiah Kalimantan Timur diikuti sejumlah 24 orang, kegiatan pendampingan perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang dilaksanakan di kabupaten PPU sejumlah 62 orang, Kota Bontang sejumlah 82 orang dan Kutai Timur sejumlah 100 orang

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Sasaran 3 : Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan

Tabel 3.16

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100

Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur Semester I dan Semester II Tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pasal 6 yaitu Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan Skala Provinsi, salah satu diantaranya adalah Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi. data agregat kependudukan mencakup himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.

Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur Semester II Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur yang dilakukan setiap saat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah teruji



ketunggagalannya melalui perekaman sidik jari dan iris mata sehingga terjamin keakurasiannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 58 ayat (4), data kependudukan dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek, antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Dalam rangka mendukung pemanfaatan data tersebut, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan fungsi untuk menyediakan serta menyebarluaskan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.17

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2025
			2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100

Pada tabel di atas penyusunan data kependudukan mencapai realisasi 100 % di tahun 2024 dan tahun 2025. DKP3A provinsi Kaltim menyusun data kependudukan secara berkala per semester sehingga target terpenuhi

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.18

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2025)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100



Penyusunan data perkembangan kependudukan Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari data registrasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta data yang berasal dari lintas sektor terkait. Data-data tersebut sudah melalui proses pembersihan serta terkonsolidasi yang dilakukan setiap tanggal 30 Juni (semester I) dan 31 Desember (semester II) dengan data center Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.. Melalui proses tersebut sehingga DKP3A Provinsi Kaltim dapat menyajikan data kependudukan 2 kali dalam 1 tahun sampai dengan periode akhir Renstra

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.19

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	100	100	100

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

6. **Faktor Keberhasilan :**

- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dll
- SOP untuk mendapatkan administrasi kependudukan mudah dipahami oleh masyarakat
- Kelengkapan kebutuhan data yang drilis Data Kependudukan Bersih (DKB) persemester melalui Ditjen Dukcapil yang menjadi satu-satunya data yang digunakan untuk semua kepentingan

Faktor Kegagalan :

- Keterbatasan tinta sehingga menghambat percetakan e KTP
- Keterbatasan penyediaan blanko E-KTP dikarenakan efisiensi anggaran untuk pengambilan blanko E-KTP di Kemdagri



- Data Kependudukan Bersih (DKB) tidak tepat waktu sehingga aplikasi E-Infoduk, buku data penduduk persemester dan profil perkembangan kependudukan menjadi terlambat dalam penyajian
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta pencatatan sipil sehingga cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil belum maksimal dan akurasi data kependudukan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi real di Daerah

Alternatif Solusi :

- Perlu lebih ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dengan Instansi/Lembaga terkait tingkat pusat, dan Pemerintah Provinsi serta Kab/Kota.
- Melakukan pelatihan dan bimtek bagi ADB agar memberikan pelayanan lebih cepat
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya adminduk

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.20

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokmen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	100	90,05

<p>Rasio Efisiensi Sasaran 3 : $\frac{1.030.906.727}{1.144.875.448} \times 100 = 90,05 \%$</p>

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan pada Sasaran 3 Meningkatkan cakupan kepemilikan dokmen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan adalah sebesar 90,05 % masuk dalam kategori efektif. Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 1 Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik adalah **honorarium dan perjalanan dinas**



8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.21

Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi
	Bidang Fasyamindustri	1.144.875.448	1.030.906.727
37.299	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	407.105.869	394.680.546
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	308.502.941	298.599.282
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	292.798.941	282.972.282
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	98.602.928	96.081.264
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	43.313.300	41.622.464
37.664	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	412.101.705	369.452.081
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	263.904.525	221.910.550
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	241.720.525	206.230.550
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	148.197.180	147.541.531
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	40.920.000	40.820.031
38.029	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	325.667.874	266.774.100
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	216.148.490	160.498.200
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.713.300	35.473.700
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	22.208.696	21.914.000
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	158.226.494	103.110.500
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	109.519.384	106.275.900
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.464.000	16.543.500
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	90.055.384	89.732.400

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu 3 Program diantaranya melaksanakan beberapa kegiatan di antaranya :

Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan pekerjaan yang dilaksanakan diantaranya bimbingan teknis pencatatan sipil diikuti kurang lebih 80 peserta internal DKP3A Provinsi Kaltim, Bimbingan Teknis Kesekretariatan diikuti 80 peserta internal DKP3A Provinsi



Kaltim, Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk diikuti 6 orang staf, Bimbingan Pencatatan Sipil diikuti 7 orang pejabat dan staf serta Bimbingan Front Office/FO diikuti 10 orang pejabat dan staf, Bimbingan operator SIAK diikuti pejabat dan staf DKP3A Provinsi Kaltim,

Program Pencatatan Sipil

Pada program ini dilaksanakan pekerjaan cetak E-KTP . kegiatan yang dilaksanakan di antaranya Pelayanan terpadu adminduk Pesta Rakyat Kaltim, Pelayanan terpadu launching program gratispol dan jospol dgn output 58 pengunjung yang melaksanakan cetak KTP, Kegiatan pelayanan adminduk pada acara HKG PKK-ke 53 dan Rakerja X PKK , Pelayanan terpadu jemput bola pelayanan administrasi kependudukan di Sekolah Luar Biasa (SLBN) Balikpapan jenis pelayanan yang diberikan perekaman percetakan KTP, penerbitan kartu identitas anak (KIA), penerbitan akta kelahiran, kegiatan pelayanan terpadu jemput bola pelayanan administrasi kependudukan di LPKA kelas II tenggarong dan LAPAS Perempuan Kelas II di Tenggarong, Pelayanan terpadu adminduk kaltim expo pada pameran Kaltim Expo tahun 2025 di Samarinda, Pelayanan terpadu jemput bola administrasi kependudukan pekerja sawit, kegiatan pelayanan terpadu pada Bazar dan bakti sosial HKN ke-61 di Samarinda, kegiatan Bazar pada PHI di Kantor Gubernur Kaltim, Kegiatan jemput bola administrasi kependudukan pekerja sawit di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur

Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Pada program ini dilaksanakan kegiatan cetak brosur pencatat kematian, brosur pencatat kelahiran, brosur pencatat perkawinan, brosur pendaftaran peristiwa penduduk, brosur penerbitan KTP, Sosialisasi dan teknik penyusunan video dalam media sosial, bimtek pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, cetak dokumen buku semester 1 kependudukan tahun 2024 dan semester 2 kependudukan tahun 2024 dna buku profil kependudukan, kegiatan pengembangan diri dan penyusunan SOP yang diikuti oleh pegawai internal DKP3A Provinsi Kaltim

Indikator Tujuan pada Renstra DP3A Provinsi Kaltim

Tertuang pada Renstra DKP3A provinsi Kaltim Tahun 2024-2026 target dan capaian indikator tujuan urusan kependudukan dan pencatatan sipil per 31 Desember 2025, diantaranya :

- Persentase Kepemilikan KTP-el se Kaltim target 99,5 % realisasi 99,22 %
- Persentase Kepemilikan KIA se Kaltim target 70 % realisasi 84,08 %
- Presentase Kepemiikan Akta kelahiran Anak se Kaltim target 99 % realisasi 99,07 %

Indikator Kinerja Daerah pada RPD Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026

Selain itu tertuang dalam Indikator Kinerja Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Provinsi Kaltim sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu dengan indikator ;



1. Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 tahun dengan target 100 % dan mencapai tersebut adalah realisasi target 100 % dalam hal ini output dari target tersebut adalah dokumen data kependudukan semester 1 dan 2 tahun 2025 terpenuhi 100 %
2. Persentase Pemanfaatan data kependudukan

Data kependudukan yang mutakhir dan akurat akan sangat mendukung dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemutakhiran data base kependudukan dilakukan agar hasil pemutakhiran benar-benar dapat di manfaatkan khususnya di lintas perangkat daerah. Tahun 2025 ada sejumlah 22 Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan sehingga target capaian mencapai 100 %

1. Dinas Sosial Provinsi Kaltim
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim
3. RSUD Abdul Wahab Sjahrani
4. RS Mata Provinsi Kaltim
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim
6. RSUD Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan
7. RSUD Atma Husada
8. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kaltim
9. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda. Provinsi Kaltim
10. Inspektorat Provinsi Kaltim
11. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim
12. Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim
13. Dinas Pekerjaan Umum dan PR Provinsi Kaltim
14. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim
15. Dinas kehutanan Provinsi Kaltim
16. Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim
17. PMPTSP Provinsi Kaltim
18. Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim
19. Dinas Perindagkop Provinsi Kaltim
20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim
21. Dinas ESDM Provinsi Kaltim
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim



$$\frac{\text{Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja}}{\text{Seluruh perangkat Daerah}} \times 100$$

$$\frac{22 \text{ OPD}}{22 \text{ OPD}} \times 100 = 70 \%$$

Sasaran 4 : TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS KELUARGA BERENCANA

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

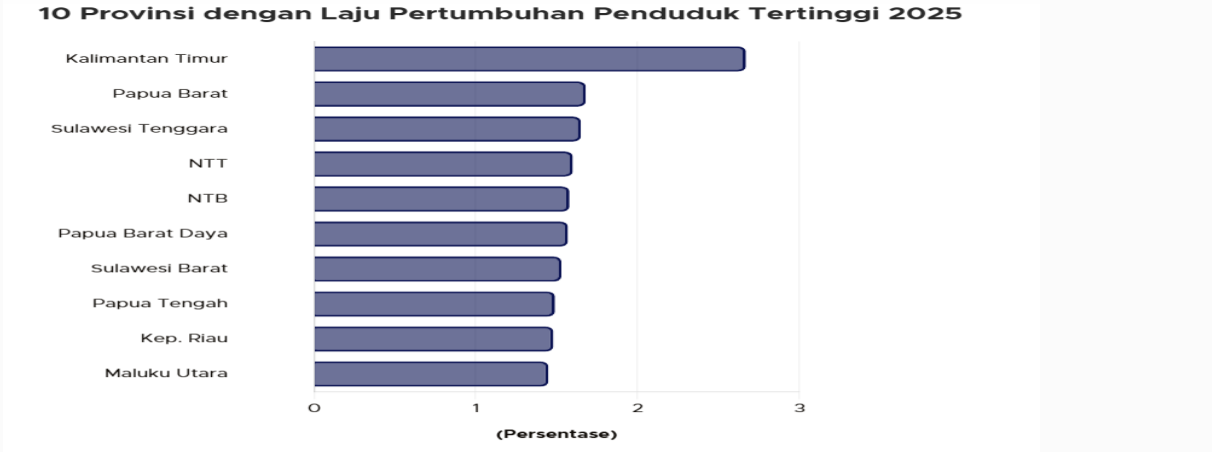
Tabel 3.22

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,63	2,67

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Sumber data penduduk yang digunakan adalah Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045

Laju pertumbuhan penduduk 2025 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2025 (Juni)





Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri/*BPS-Statistics Indonesia and Ministry of Home Affairs*

Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia, pada tahun 2025 laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur ada di angka 2,67%. Lonjakan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur jadi yang terbesar di Indonesia, dua tahun sebelumnya pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur hanya sebesar 1,37%. Salah satu faktor yang mendorong laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur adalah migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Paser	289,8	1,07	6,79	28	107,5
Kutai Barat	180,3	0,96	4,22	14	110,3
Kutai Kartanegara	845,6	3,16	19,81	32	107,5
Kutai Timur	470,4	1,69	11,02	15	114,9
Berau	265,3	1,43	6,22	13	113,3
Penajam Paser Utara	400,0	18,49	9,37	127	105,2
Mahakam Ulu	34,7	1,41	0,81	2	106,3
Kota Balikpapan	725,4	1,11	17,00	1.424	104,0
Kota Samarinda	865,3	0,93	20,28	1.208	103,0
Kota Bontang	190,7	1,35	4,47	1.186	104,6
Kalimantan Timur	4.267,6	2,67	100,00	34	106,8

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri/*BPS-Statistics Indonesia and Ministry of Home Affairs*

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Thousands)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Paser	287,0	1,10	7,09	27	107,8
Kutai Barat	178,7	0,99	4,42	13	110,8
Kutai Kartanegara	789,8	2,14	19,52	29	107,9
Kutai Timur	463,0	1,71	11,44	15	115,4
Berau	261,8	1,45	6,47	12	113,8
Penajam Paser Utara	267,7	11,38	6,62	84	105,7
Mahakam Ulu	34,2	1,39	0,85	2	107,7
Kota Balikpapan	717,2	1,10	17,73	1.407	104,2
Kota Samarinda	858,1	0,96	21,21	1.197	103,3
Kota Bontang	188,3	1,37	4,65	1.171	105,3
Kalimantan Timur	4.045,9	1,93	100,00	32	107,3



Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD Provinsi Kaltim dan LPPD Provinsi Kaltim

Tertuang dalam Indikator Tujuan Renstra DKP3A Provinsi Kaltim dan Kinerja Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang juga ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPD Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026 untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu dengan indikator Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah :

1. Persentase TFR (Angka Kelahiran Total)

Capaian target Presentase TFR tahun 2025 sesuai sumber data dari SIGA BKKBN tahun 2025 adalah

$\frac{\text{Total Fertility Rate/TFR Provinsi}}{\text{Target Fertility Rate/TFR Provinsi yang ditetapkan Pemerintah Pusat Terhadap Provinsi yang bersangkutan}} \times 100$	$\frac{2,13}{2,14} \times 100 = 99,53 \%$
--	---

2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

$\frac{\text{Total peserta KB aktif modern}}{\text{Total pasangan usia subur usia 15-49 tahun}} \times 100$	$\frac{375.724}{565.870} \times 100 = 66,40 \%$
---	---

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

$\frac{\text{Persentase kebutuhan ber KB Yang tidak terpenuhi}}{\text{Target persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk Provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$	$\frac{18,80}{21,00} \times 100 = 89,52 \%$
---	---



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.23

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2025
			2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,93	2,67

Secara kuantitas penduduk Kaltim mengalami peningkatan yang signifikan dengan pertumbuhan yang sangat pesat di tahun 2025 di bandingkan tahun 2024. Peningkatan ini dipicu tingkat kelahiran yang cukup tinggi seiring dengan meningkatnya migran yang masuk ke wilayah Kaltim khususnya migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.24

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2025)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,73	2,67

Target Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2026 berdasarkan target akhir Renstra DP3A Provinsi Kaltim adalah 2,73. Target ini ditetapkan saat awal penyusunan Renstra DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026 dikarenakan prediksi lonjakan angka kelahiran penduduk serta migrasi besar-besaran penduduk ke Ibu Kota Negara (IKN)



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.25

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,67	1,09	.

Menurut data BPS, laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2025 ada di angka **1,09** %, laju pertumbuhan penduduk tersebut dihitung berdasarkan penduduk pada penduduk pada September 2020 dibandingkan dengan penduduk Juni 2025. Terdapat tiga komponen yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk yaitu angka kelahiran, kematian, dan migrasi.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

- fasilitasi keluarga berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi untuk mendorong pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- Tingginya partisipasi pasangan usia subur dalam mengikuti program KB
- Kemudahan pada akses pelayanan KB
- Terbitnya Pergub no. 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai dasar mewujudkan pemahaman SDM ketahanan keluarga

Faktor Kegagalan :

- Adanya pengaruh dari imigrasi penduduk yang cukup tinggi dibandingkan angka kelahiran
- Masih rendahnya pemahaman tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Alternatif Solusi :

- Melakukan edukasi kepada organisasi masyarakat , peempuan tentang KB dan kesehatan reproduksi mereka, menunda usia perkawinan, dan memiliki 2 anak cukup



- Koordinasi dengan Dinas pengampu urusan pengendalian penduduk dan KB dalam upaya peningkatan program KB di Kabupaten/Kota
- Optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas untuk memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga melalui penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di setiap desa/kelurahan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.26

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	2,67	92,45

<p>Rasio Efisiensi Sasaran 4: $\frac{1.401.667.161}{1.516.175.386} \times 100 = 92,45 \%$</p>
--

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan pada Sasaran 4 Laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 92,45 % masuk dalam kategori efektif. Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 4 Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik pada belanja

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.27

Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi
	Bidang Dalduk KB	1.516.175.386	1.401.667.161
37.301	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	531.516.169	489.728.970
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah	531.516.169	489.728.970
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	329.330.986	312.851.707
2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	202.185.183	176.877.263
37.666	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	315.116.725	276.593.325
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	315.116.725	276.593.325
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	66.511.393	63.406.693
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	188.083.800	159.269.000
38.031	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	669.542.492	635.344.866
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	628.297.124	600.664.018
2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	98.999.556	88.552.956
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	41.245.368	34.680.848
2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	41.245.368	34.680.848

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengampu 3 Program, yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Pada Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan kegiatan diantaranya Advokasi dan sosialisasi GDPK diikuti 40 peserta di Berau, Advokasi dan sosialisasi GDPK di Kota



Balickpapan diikuti sejumlah 30 peserta dan Rakorda Bidang Dalduk KB diikuti oleh Dinas Dalduk KB Kabupaten/Kota se Kaltim di ikuti 60 orang peserta di IKN

Program Kleuarga Berencana dilaksanakan kegiatan diantaranya Pengembangan dan penyediaan materi promosi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan hak-hak reproduksi diikuti sejumlah 70 orang terdiri dari unsur calon pengantin, perwakilan instansi terkait. Selanjutnya pelaksanaan Rakor Stunting diikuti

sejumlah 100 terdiri dari FKPD, Perangkat Daerah terkait, Perwakilan pemerintah kab/kota se Kaltim, TPPS Provinsi dan kab/kota serta mitra kerja DP3A Provinsi Kaltim

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dilaksanakan kegiatan Seminar parenting ““Membangun Pola Asuh Positif untuk Mewujudkan Generasi Unggul dan Berkarakter”” diikuti sejumlah 50 peserta di Kota Bontang, Seminar parenting “Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Pola Asuh Berkualitas” diikuti sejumlah 100 orang di Kota Samarinda, Kegiatan seminar club ayah di Kabupaten Kutai Timur diikuti sejumlah 50 orang. Selanjutnya kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPK) di Kabupaten Berau terdiri dari 40 (empat puluh) orang peserta yang merupakan anggota Kelompok UPPKA di Kampung KB kabupaten Berau.

Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak

Tabel 3.28

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada Perangkat Daerah	%	80	100	...

Data didapat dari pengumpulan data pilah dari perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur per tahun. Dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah data gender \& anak yang tersedia}}{\text{Target data gender \& anak}} \times 100 = 100 \%$$

Jumlah data yang terpenuhi dari target diantaranya adalah :



1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.29

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2025
			2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada Perangkat Daerah	%	100 %	100 %	100 %

Capaian kinerja pada indikator persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada DP3A Provinsi Kaltim dari tahun sebelumnya hingga tahun 2025 telah meemnuhi target 100 %

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.30

Perbandingan ealisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 20245)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada Perangkat Daerah	%	80	100

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase ketersediaan data terpilah gender dan anak pada Perangkat Daerah	%	86,49	-	Tidak ada perbandingan kinerja tahun



					2024 dengan standar nasional.
--	--	--	--	--	-------------------------------

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

- Capaian data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan data pilah
- Adanya kebijakan dan data regulasi yang memanfaatkan penggunaan data pilah sebagai dasar proses penyusunan program kegiatan
- Tingginya komitmen perangkat daerah dalam penyelenggaraan program one map one data sehingga data gender bagian dari hal tersebut
- Peningkatan kinerja petugas pengelola data kekerasan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Data kekerasan yang optimal

Faktor Kegagalan :

- Kurangnya kesadaran dan disiplin perangkat daerah dalam memberikan data secara terpilah
- Belum optimalnya pengelolaan data pilah di setiap stakeholder

Alternatif Solusi :

- Selalu memberikan pendampingan dan bimbingan kepada perangkat daerah dalam membuat laporan data terpilah
- Sosialisasi dan bimtek terkait penyusunan data pilah/data gender

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.32

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	100	79,24



Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan pada Sasaran 5 Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak adalah sebesar 79,24 % masuk dalam kategori efektif. Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 5 Capaian kinerja secara umum tidak mengalami peningkatan , hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik pada belanja

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak didukung oleh Program/Kegiatan sebagai berikut :

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	791.605.694	627.304.597
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	791.605.694	627.304.597
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	381.625.714	250.440.332
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	409.979.980	376.864.265

Program Sistem Data Gender dan Anak memiliki tugas dan fungsi ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil program/kegiatan . melalui aplikasi SIMFONI PPA merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara indonesia maupun warga negara asing. SIMFONI PPA bekerja sama dengan instansi pemerintahan di setiap provinsi / kabupaten / kota sehingga aplikasi dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dibawah pada tingkat nasional meliputi provinsi / kabupaten / kota secara up to date dan rutin.

DP3A Provinsi Kaltim melalui program ini memberkan output Profil kekerasan serta buku data kekerasan bulanan



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.34

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	71,00

Persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A diukur dari aspek kualitas yang dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Kualitas dengan Target Kualitas melalui Penghitungan capaian Sasaran Kinerja.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.35

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan Tahun 2025
			2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	71,90	71,90

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada DKP3A Provinsi Kaltim Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 71,90 dengan predikat 'BB' (Sangat Baik).

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel 3.36

Perbandingan ealisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2026)	Realisasi (Th. 2025)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	71,50	71,90
---	---	---	-------	-------	-------

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.37

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	71,90 (2024)	68,36	

Nilai SAKIP Kementerian PPPA-RI tahun 2024 adalah 68,36 (B) dengan target 71 (BB). Pada tabel di atas capaian realisasi DP3A Provinsi Kaltim Tahun 2024 71,90 dengan Predikat BB dan melebihi dari capaian nasional (Kementerian PPPA-RI)

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Provinsi lainnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi PPPA Kabupaten Semarang	Ket. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	%	71,90 (2024)	80,25 (2024)	

Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2024 pada Dinas PPPA Kabupaten Semarang Jawa Tengah adalah 80, 25 (Predikat A). Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah dalam memperkuat budaya kinerja, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap program dan anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Implementasi Akuntabilitas yang baik juga menjadi fondasi penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (masing-masing dari tabel 1 s.d 4)

Faktor Keberhasilan :

- Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik dengan ukuran kinerja yang SMART
- Pemantauan, evaluasi dan pengukuran capaian kinerja dilakukan berjenjang dan berkala
- Rencana aksi kinerja berjalan dinamis dan dipantau secara berkala



- Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kependudukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Faktor Kegagalan :

- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya di gunakan untuk penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
- Sarana dan prasarana yang belum maksimal dalam menunjang pelaksanaan tugas
- kurangnya pemahaman pegawai terhadap SAKIP,
- kurangnya pemahaman sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terpadu;

Alternatif Solusi :

- Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja pegawai
- Lingkup DKP3A dapat mengimplementasikan kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK)
- Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan semakin ditingkatkan

Aalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.38

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	proses	94,94

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat analisis efisiensi pelaksanaan pada Sasaran 6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah sebesar 94,94 % masuk dalam kategori efektif. Pada pelaksanaan program kegiatan sasaran 6 Capaian kinerja secara umum mengalami peningkatan yang baik, hanya saja untuk penyerapan anggaran belum terserap dengan baik pada belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.39



Program/Kegiatan penunjang pencapaian sasaran

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.163.857.087	21.991.127.850
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	524.147.533	520.012.691
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.430.000	63.218.500
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.810.000	2.792.000
2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.513.000	2.495.000
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.189.110	77.286.436
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.361.943	162.156.775
2.08.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.892.480	123.638.980
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.754.158.627	13.232.199.314
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.399.780.392	12.929.430.714
2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	243.218.235	195.517.000
2.08.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19.000.000	18.826.000
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	29.909.000
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.200.000	21.185.100
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	40.960.000	37.331.500
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	555.208.761	547.991.300
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	284.373.000	283.042.120
2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	228.940.801	223.554.180
2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.894.960	41.395.000
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.096.495.655	2.058.496.895
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	379.205.425	379.199.217
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.186.964	56.169.602
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	814.094.232	809.248.500



2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.791.600	15.477.500
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.352.922	66.131.000
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	666.009.312	636.613.076
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	95.855.200	95.658.000
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.229.047.091	1.194.458.582
2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.900.000	66.480.000
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.161.147.091	1.127.978.582
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.711.230.501	3.247.916.131
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.902.000	10.340.000
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.360.000	8.971.500
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.881.786.301	2.637.084.698
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.293.568.919	1.190.052.937
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.004.999	54.995.571
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.655.420	286.863.381
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.332.000	94.293.000
2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	854.576.500	753.900.985

2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pencapaian SDG's Tahun 2025

Kode Indikator Metadata 4	Indikator Metadata 4	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	Kesepakatan OPD Yang Mengisi	KETERANGAN
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	2,18	2,14	2,13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) (Saran BKKBN/RPJMN)	
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau	1 Kebijakan	1 Kebijakan		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)	



	kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.					
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	17	16		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)	
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	4,29	3,99		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) (Capaian dari BPS) (Target dari Bappeda)	
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pemerintah daerah.	14,54	30		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) (Capaian dari BPS)	link yang diberikan berisi data tahun 2023
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	26,40%	30		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)	Link yang diberikan berisi data tahun 2021 s/d 2023 dan untuk seluruh Indonesia
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	100	100		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)	
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	100	100		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) (Perda 5/2024 yang mengubah Perda 2/2016 tentang pengarusutamaan	



					gender dalam pembangunan daerah)	
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas	0.60**	1,13		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) (Capaian Tahun 2022 dari BPS)	
11.7.2 (a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	0,003	0,003		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)	
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0,003	0,003		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)	
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.				Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)	Data dari Survei BPS
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	24,96	23,46		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)	
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	14,54	-		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DKP3A) (8 Orang dari 55 Anggota Dewan)	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	35			Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DKP3A)	
16.9.1*	Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	100%	100%		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)	



	menurut umur				(Capaian dan Target dari RPJMD)	
16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0 -17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	98%	100%		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) (Target Intervensi Nasional)	
16.9.1(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	98%	100%		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) (Target Intervensi Nasional)	

3. REALISASI ANGGARAN

a. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.41

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja		Anggaran		
		Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT	23,23	57,44	5.031.587.771	4.799.011.646	95,38
2	Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan yang berdaya saing bidang politik dan ekonomi	300	209	1.549.789.468	1.479.424.175	95,26
3	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	100	100	1.144.875.448	1.030.906.727	90,05



4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Keluarga Berencana	2,63	2,67	1.516.175.386	1.401.667.161	92,45
5	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	80	100	791.605.694	627.304.597	79,24
6	Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak	71,90	71,90	23.163.857.087	21.991.127.850	94,94
Total				33.197.890.854	31.329.442.156	94,44

Analisis :

Pada realisasi anggaran berdasarkan perjanjian kinerja diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja meningkat dengan rata-rata capaian diatas 90 persen, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya memadai

b. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

Tabel 3.42

Realisasi anggaran per progrm kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		33.197.890.854	31.329.442.156
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.163.857.087	21.991.127.850
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	524.147.533	520.012.691
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.430.000	63.218.500
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.810.000	2.792.000



2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.513.000	2.495.000
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.189.110	77.286.436
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.361.943	162.156.775
2.08.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.892.480	123.638.980
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.754.158.627	13.232.199.314
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.399.780.392	12.929.430.714
2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	243.218.235	195.517.000
2.08.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19.000.000	18.826.000
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	29.909.000
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.200.000	21.185.100
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	40.960.000	37.331.500
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	555.208.761	547.991.300
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	284.373.000	283.042.120
2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	228.940.801	223.554.180
2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.894.960	41.395.000
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.096.495.655	2.058.496.895
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	379.205.425	379.199.217
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.186.964	56.169.602
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	814.094.232	809.248.500
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.791.600	15.477.500
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.352.922	66.131.000
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	666.009.312	636.613.076
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	95.855.200	95.658.000
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.229.047.091	1.194.458.582
2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.900.000	66.480.000



2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.161.147.091	1.127.978.582
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.711.230.501	3.247.916.131
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.902.000	10.340.000
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.360.000	8.971.500
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.881.786.301	2.637.084.698
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.293.568.919	1.190.052.937
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.004.999	54.995.571
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.655.420	286.863.381
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.332.000	94.293.000
2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	854.576.500	753.900.985
37.295	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.549.789.468	1.479.424.175
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	297.350.678	277.971.752
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	181.859.590	167.725.755
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	65.831.500	62.139.409
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	49.659.588	48.106.588
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	284.801.430	258.854.788
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	106.351.568	99.812.880
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	178.449.862	159.041.908
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	967.637.360	942.597.635



2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	64.060.455	61.474.291
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	846.155.337	826.099.776
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	57.421.568	55.023.568
37.660	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.291.670.694	2.190.368.703
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	863.906.478	788.755.081
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	489.866.030	419.649.826
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	374.040.448	369.105.255
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang	1.111.685.470	1.093.675.364
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	863.840.000	858.783.945
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	247.845.470	234.891.419
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	316.078.746	307.938.258
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	316.078.746	307.938.258
38.391	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	791.605.694	627.304.597
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	791.605.694	627.304.597
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	381.625.714	250.440.332
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	409.979.980	376.864.265
38.756	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	809.647.043	808.164.749



2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	270.842.247	270.273.748
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	115.068.431	114.996.900
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	155.773.816	155.276.848
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	538.804.796	537.891.001
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	275.031.530	274.708.884
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	263.773.266	263.182.117
39.121	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.930.270.034	1.800.478.194
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.109.040.964	989.408.816
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	452.598.628	440.355.976
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	656.442.336	549.052.840
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	402.335.074	397.472.890
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	168.276.590	164.213.940
2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	234.058.484	233.258.950
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	418.893.996	413.596.488
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	418.893.996	413.596.488
37.299	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	407.105.869	394.680.546
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	308.502.941	298.599.282
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	292.798.941	282.972.282



2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	98.602.928	96.081.264
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	43.313.300	41.622.464
37.664	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	412.101.705	369.452.081
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	263.904.525	221.910.550
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	241.720.525	206.230.550
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	148.197.180	147.541.531
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	40.920.000	40.820.031
38.029	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	325.667.874	266.774.100
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	216.148.490	160.498.200
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35.713.300	35.473.700
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	22.208.696	21.914.000
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	158.226.494	103.110.500
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	109.519.384	106.275.900
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.464.000	16.543.500
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	90.055.384	89.732.400
37.301	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	531.516.169	489.728.970
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah	531.516.169	489.728.970
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	329.330.986	312.851.707
2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	202.185.183	176.877.263
37.666	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	315.116.725	276.593.325
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	315.116.725	276.593.325
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi	66.511.393	63.406.693



	sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	188.083.800	159.269.000
38.031	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	669.542.492	635.344.866
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	628.297.124	600.664.018
2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	98.999.556	88.552.956
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	41.245.368	34.680.848
2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	41.245.368	34.680.848



BAB VI

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim tahun 2025 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKJIP merupakan langkah dalam memonuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim menyajikan kinerja yang telah dicapai berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Berdasarkan uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran LkjiP Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

- SASARAN 1 Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan anak terhadap KDRT dengan target 23,23 rasio dan capaian 57,44 rasio
- SASARAN 2 Meningkatnya upaya penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan perempuan yang berdaya saing dengan capaian 70 %
- SASARAN 3 Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan dengan target 100 % dan capaian 100%
- SASARAN 4 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk kinerja dengan target 2,63 capaian 2,67
- SASARAN 5 Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak dengan target 80% dan capaian 100%
- SASARAN 6 Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di Dukung ASN Berakhlak capaian inerja dengan target 71,00 dan capaian 71,90

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Kalimantan Timur. Demikian Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 26 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kaltim,



Anik Nur Aini, S.Kom
Pembina

Nip. 197410302006042017